



**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DI KABUPATEN BATANG BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 106/Pid.Sus/2017/PN.Btg.**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan
pendidikan Sarjana pada Program Strata I Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Disusun oleh :

AHMAD SAIFUL ANAS

NPM. 201003742017609

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2023**



**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 106/Pid.Sus/2017/PN.Btg**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan pada Program Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Disusun oleh :
AHMAD SAIFUL ANAS
NPM. 201003742017609

Mengesahkan,
Dosen Pembimbing

Hudi Karno Sabowo, S.H., M.H.
NIDN. 0631016001

Anggota,

Heri Purnomo, S.H., M.Hum.
NIDN. 0616086201

Anggota,

Sumartini Dewi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0608036602

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. B. Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	6
3. Tujuan dan Manfaat	6
4. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
1. Hutan dan Manfaatnya	10
2. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	13
3. Tindak Pidana	18
4. Kriminologi	21
5. Pencurian	25
6. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian	29

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	33
1.	Spesifikasi Penelitian	33
2.	Metode Pendekatan	34
3.	Teknik Pengumpulan Data	35
4.	Metode Analisis Data	36
5.	Metode Penyajian Data	37
BAB IV	PEMBAHASAN	38
1.	Bagaimanakah penanganan kasus tindak pidana <i>illegal looting</i> di Kabupaten Batang berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 106/Pid.Sus/2017/PN.Btg.?.....	38
2.	Hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana <i>illegal looting</i> di Kabupaten Batang berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 106/Pid.Sus/2017/PN.Btg., serta bagaimana penanggulangannya?	55
BAB V	PENUTUP	68
1.	Simpulan	68
2.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Illegal logging merupakan perbuatan berupa pencurian kayu yang ada dalam kawasan hutan milik Negara atau alam hutan hak (milik), dan atau yang memiliki atau pemegang hak izin dalam rangka melakukan penebangan lebih jauh dari jatah atau porsi yang telah ditetapkan negara sesuai dengan berdasarkan perizinan. Oleh karenanya kegiatan disini banyak sekali membawa atau memberikan dampak negatif kurang baik, baik dapat dilihat dari aspek sudut unsur sektor perekonomian maupun rusaknya pada kawasan alam hutan yang ada.

Terungkapnya perkara tindak pidana *illegal logging*, sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 106/Pid.Sus/2017/PN.Btg., selanjutnya penulis akan menguraikan kajian ilmiah hukum berjudul : **“KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN BATANG BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR: 106/Pid.Sus/2017/PN.Btg.”**.

Penelitian bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan memecahkan masalah dengan cara menyelidiki serta dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang terpacu pada putusan pengadilan tersebut diatas. Selanjutnya pendekatan secara normative, yaitu memadukan adanya putusan pengadilan dan perundang-undang terkait dengan kajian ilmiah. Selanjutnya hasil penelitian tersebut disajikan secara deskriptif, melalui kerangka penulisan dengan kaidah yang baik dan benar dalam bentuk penulisan ilmiah atau skripsi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, terjadinya tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Batang, jelas melanggar dan bertentangan keterangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Pemanfaatan hasil Hutan Kayu yaitu berkaitan izin usaha kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup), tidak asal tebang atau mengambil segala barang yang berada di dalam lahan hutan secara illegal atau liar. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat diberikan adalah pidana penjara, denda serta perampasan barang yang digunakan dan hasil kejahatan yang telah dilakukan.

Kata Kunci : *illegal logging*, Kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam hutan.